

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Defenisi Dampak Menurut Para Ahli

1. Pengertian Dampak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Dampak adalah pengaruh yang ditimbulkan, baik yang menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan.¹ Selain itu dampak juga bisa dibilang adalah sebuah hasil atau akibat dari suatu tindakan, kejadian, atau peristiwa. Ini dapat bersifat positif maupun negatif tergantung pada konteksnya. yang dimaksud dengan dampak positif adalah keadaan yang lebih baik dari keadaan sebelumnya. Ini dapat menghasilkan peningkatan dalam kegiatan yang dilakukan, seperti sikap, kesejahteraan, partisipasi, dan tingkah laku sosial lainnya. Sedangkan dampak negatif adalah ketika suatu situasi menurun dari sebelumnya, menyebabkan hal-hal menjadi lebih buruk bagi masyarakat.² Berikut ini adalah beberapa definisi dampak menurut para ahli:

a) Aresandi S

¹ Puput Nuraini, "Dampak Sosial Ekonomi Dan Lingkungan Terhadap Keberadaan Program Badan Usaha Milik Desa (Studi Kafe Mepet Sawah Kabupaten Luwu)". Skripsi (Palopo: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, 2022). 12

² Aldinur Armi, Saleh Soeaidy, Ainul Hayat". Dampak Sosial Ekonomi Kebijakan Relokasi Pasar (Studi Kasus Relokasi Pasar Dinoyo Malang)". Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 4, No. 10, 2337 - 5736

Dampak adalah nilai yang kita berikan pada kehidupan seseorang atau lingkungannya.

b) Jotin Khisty dan B. Kent Lall

Dampak adalah pengaruh pelayanan angkutan umum terhadap wilayah yang dilayaninya secara keseluruhan maupun lingkungan sekitarnya.

c) Bangku

Dampak adalah tingkat kerusakan yang disebabkan oleh penggunaan lingkungan tertentu terhadap pengguna lahan lainnya.

Berbicara tentang dampak tidak lepas dari karakteristiknya. Terdapat dua jenis dampak yang paling umum adalah dampak primer dan dampak sekunder. Dampak primer berkaitan dengan perubahan lingkungan sekitar yang disebabkan secara langsung oleh aktivitas.³

Contoh: Membangun pabrik dekat sungai memiliki dampak utama berupa pencemaran air. Dampak ini menghasilkan efek sekunder seperti matinya ikan, penurunan kualitas air minum, dan kerusakan ekosistem.

Ada dua jenis konsekuensi dari aktivitas atau kebijakan yaitu, dampak yang diinginkan dan tidak diinginkan.

Dampak yang diinginkan mencakup hasil yang

³ Dean Gilbert Mahino, Johannis Kaawoan, Ventje Kasenda. "Dampak Sosial Ekonomi Melalui Program Kelompok Usaha Bersama (Kube) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Suatu Studi di Desa Peta Kecamatan Tabukan Utara Tahun 2015-2017)". Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 1 No. 1 Tahun 2018. 2

diharapkan seperti pertumbuhan ekonomi lokal dan peningkatan lapangan kerja. Di sisi lain, dampak yang tidak diinginkan sering kali berdampak negatif, seperti pencemaran dan masalah kesehatan. Kebijakan memiliki konsekuensi penting meskipun hasilnya tidak sesuai harapan, seperti upaya pemerintah untuk mengurangi kemiskinan meskipun programnya tidak berhasil

Dampak dari sebuah program adalah perubahan yang disebabkan oleh program itu sendiri atau kebijakan yang ada di program tersebut. Ini dapat mencakup perubahan dalam kondisi fisik, sosial, atau ekonomi, atau bahkan perubahan dalam sikap dan perilaku. Oleh karena itu dampak dari sebuah program bisa saja mempengaruhi pertumbuhan sebuah ekonomi. Sedangkan dampak ekonomi adalah dampak atau akibat dari suatu peristiwa, situasi, atau kebijakan yang mengakibatkan perubahan positif dan negatif dalam perekonomian. Hasilnya adalah dampak positif dari sisi ekonomi, yaitu terciptanya lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat lokal. Dampak ekonomi negatif merupakan perilaku ekonomi masyarakat yang saat ini cenderung melakukan konsumsi (hanya menggunakan produknya, namun tidak

memproduksinya sendiri).⁴ Berikut ini ada beberapa indikator dampak ekonomi:

a) Penjualan

Penjualan ialah aktivitas atau bisnis menjual produk atau jasa. Dalam proses penjualan, penjual menawarkan kepemilikan pembeli atas barang dengan harga tertentu. Penjualan dilakukan untuk memperoleh keuntungan, tetapi penjualan tidak selalu mengalami peningkatan atau menghasilkan keuntungan yang besar. Aspek penjualan dapat dilihat melalui volume penjualan.

b) Pendapatan

Pendapatan memiliki dua arti. (1) Pendapatan kotor, yaitu seluruh pendapatan yang diperoleh petani dalam setahun dari usahataniannya, yang dapat dihitung dari penjualan atau penukaran hasil produksi yang berharga; (2) Pendapatan bersih, yaitu seluruh pendapatan yang penghasilan petani dalam setahun. Banyaknya hasil panen yang dicapai seorang petani dalam satu tahun dikurangi biaya produksi selama proses produksi. Biaya produksi meliputi biaya tenaga kerja asli dan biaya asli peralatan produksi.

c) Aktivitas Lapangan Kerja

⁴ Sri Setiawatia, Fournita Agustina, Evahelda. "Dampak Sosial Ekonomi Program Pemberdayaan Petani Kebun Kelapa Sawit Rakyat Di Kabupaten Bangka". *Journal of Integrated Agribusiness*, 2 (1) 2020. 6

Pekerjaan adalah pelaksanaan pekerjaan, dan setelah pekerjaan selesai, orang dapat menikmati hasil pekerjaannya. Kegiatan dalam bekerja mencakup unsur kegiatan sosial dan bertujuan untuk menghasilkan sesuatu dan pada akhirnya memenuhi kebutuhan hidup. Jadi pada dasarnya orang bekerja tidak hanya untuk menjamin kelangsungan hidup, tetapi juga untuk mencapai standar hidup yang lebih baik.⁵

Selain itu dampak perekonomian juga dipengaruhi oleh perbedaan besar pembangunan antar daerah.⁶ oleh karena itu pembangunan ekonomi sangat penting bagi suatu daerah, meskipun daerah tersebut sudah menjadi kaya. Namun tingkat kesejahteraan tersebut masih memerlukan pembangunan ekonomi sehingga perlu ditingkatkan atau paling tidak dipertahankan. Sebab perkembangan perekonomian suatu daerah dapat memberikan dampak positif dan negatif. Meskipun dampak positifnya tentu saja sangat menguntungkan, namun dampak negatifnya sangat merugikan daerah-daerah yang

⁵ Tifani Sasnila Silitonga, Asal Wahyuni Erlin Mulyadi."Analisis Dampak Ekonomi Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional (Studi Kasus pada Revitalisasi Pasar Tanggul Surakarta"Jurnal Mahasiswa Wacana Publik Volume 1, Nomor 2, 2021. 400

⁶ Reni Ria Armayani Hasibuan & Siti Aisa."Dampak Dan Resiko Perpindahan Ibu Kota Terhadap Ekonomi Di Indonesia". At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam, Volume V No. 1 Januari – Juni 2020. 186

terkena dampaknya.⁷ Karena tidak mungkin ada pembangunan tanpa dampak negatif, maka sangat bijaksana bagi para pengambil kebijakan untuk selalu meminimalkan dampak negatif dan kerugian terhadap masyarakat selama proses pembangunan. Sebab, pada dasarnya tujuan pembangunan ekonomi itu sendiri bukanlah untuk meningkatkan kemiskinan, namun untuk meningkatkan kesejahteraan.⁸

B. Evaluasi Program

1. Pengertian Evaluasi Program

a. Evaluasi

Jika seseorang mendengar istilah evaluasi, maka sering kali yang terbayang adalah hal-hal yang terkait dengan hasil dari suatu tindakan atau hasil yang diinginkan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Evaluasi berasal dari kata evaluation, yang kemudian dijadikan kata serapan dalam bahasa Indonesia untuk mempertahankan kata aslinya dengan istilah "EVALUASI". Sehingga sampai saat ini istilah evaluasi menjadi hal yang tidak asing dalam bahasa Indonesia.⁹ Secara umum, konsep evaluasi adalah proses memberikan informasi bahwa sejauh mana

⁷ Muhammad Hasan & Muhammad Aziz, *Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat Strategi Pembangunan Manusia Dalam Perspektif Ekonomi Lokal*. (CV. Nur Lina ISBN : 978-602-51907-6-6 & Pustaka Taman Ilmu Cetakan I Mei 2018). 17

⁸ Ibid. 18

⁹ Dr. Ambiyar, M.pd. & Dr. Muharika D, SST, M.Pd.T, *Metodologi Penelitian Evaluasi Program*, (Bandung: Cv, Alfabeta Bandung, 2019). 8

kegiatan tertentu dicapai, perbedaan dalam kinerja standar tertentu adalah untuk memeriksa apakah ada dua perbedaan, dan bagaimana manfaat dicapai dibandingkan dengan harapan yang diharapkan.¹⁰ Kata "evaluasi" dalam kehidupan sehari-hari sering dianggap sinonim dari kata "penilaian". Istilah ini merujuk pada tindakan pengambilan keputusan yang dilakukan untuk menilai suatu objek, keadaan, peristiwa, atau kegiatan tertentu yang sedang diamati.¹¹

Dari sejumlah definisi yang telah diungkapkan, terdapat beberapa pokok pikiran yang terkandung dalam pengertian "evaluasi" sebagai suatu kegiatan yang terencana dan sistematis, yang mencakup:

- a) Pengamatan dilakukan untuk mengumpulkan data atau fakta.
- b) Penggunaan pedoman yang telah ditetapkan.
- c) Pengukuran atau perbandingan hasil pengamatan dengan pedoman-pedoman yang telah ditetapkan sebelumnya.
- d) Penilaian dan pengambilan keputusan.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi harus objektif, dalam arti harus dilakukan

¹⁰ Muhanmad Mujaddid, "Filosofi Monev Posisi Kader", diakses pada 8 maret 2025. laman <https://lppik.ums.ac.id/filosofi-monev/>

¹¹ Prof. Dr. Ir. Totok Mardikanto, M.S. Dr. Ir. H. Poerwoko Soebiato, M.Si., *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, CV, 2017). 264

berdasarkan data atau fakta, bukan berdasarkan praduga atau intuisi seseorang yang melakukan evaluasi, dan menggunakan pedoman-pedoman tertentu yang telah ditetapkan terlebih dahulu.¹²

b. Program

Sebagian orang mendefinisikan secara umum bahwa program adalah sebuah rencana, contohnya saja jika seseorang ditanyakan mengenai program apa yang akan dilakukannya di masa yang akan datang maka mereka akan mengemukakan rencana-rencana yang telah disusun untuk dapat di kerjakan di masa yang akan datang.¹³

Jika secara umum program dikatakan sebagai sebuah rencana dalam kajian khusus evaluasi program memiliki makna yang lebih khusus. Sebab menurut para ahli, apabila program langsung dikaitkan dengan evaluasi program maka program di definisikan sebagai suatu unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan banyak orang. Karena program merupakan suatu unit atau suatu kesatuan kegiatan maka dapat dikatakan bahwa program merupakan suatu system yang merupakan kumpulan dari sub-sub system yang bekerja dalam mencapai

¹² Ibid. 265

¹³ Ibid. 17

suatu tujuan kegiatan dalam sebuah organisasi. Agar program dapat tetap terlaksana dengan baik dengan mengarah kepada tujuan organisasi maka perlu dilakukan evaluasi. Evaluasi yang dilakukan dengan sasaran suatu program disebut dengan evaluasi program.¹⁴

Salah satu contoh implementasi program yang memiliki beragam bentuk kegiatan adalah program Zmart yang diinisiasi oleh BAZNAS. Program ini terdiri dari beberapa jenis, di antaranya: 1) Zmart Santripreneur, yaitu pengembangan usaha ritel atau warung di lingkungan pesantren yang dikelola oleh santri. 2) Zmart Reguler, berupa dukungan modal usaha, pelatihan, dan pendampingan mustahik untuk mengembangkan warung. 3) Zmart Community, berbasis komunitas dengan pendampingan kelompok mustahik dalam satu wilayah. 4) Zmart Digital, yang menekankan digitalisasi usaha melalui kasir digital, QRIS, atau marketplace. 5) Zmart Koperasi, yang dikelola dalam bentuk koperasi mustahik untuk memperkuat akses permodalan dan distribusi. 6) Zmart Center, berupa warung atau toko binaan BAZNAS yang dijadikan pusat percontohan. 7) Zmart Mitra, hasil kerja sama dengan perusahaan atau lembaga tertentu, biasanya melalui program CSR. 8) serta Zmart Desa, yang berfokus pada pengembangan warung

¹⁴ Ibid 18

mustahik di tingkat desa dengan integrasi pemberdayaan desa zakat.

Agar program-program tersebut dapat berjalan secara efektif dan mencapai tujuan pemberdayaan ekonomi mustahik, maka diperlukan evaluasi program yang berkesinambungan. Evaluasi ini berfungsi untuk memastikan bahwa setiap jenis program Zmart berjalan sesuai sasaran, memberikan manfaat yang nyata, dan mendukung tujuan besar organisasi dalam memberdayakan umat.

c. Evaluasi Program

Dapat diketahui bahwa salah satu objek dalam evaluasi adalah program. Program adalah suatu rencana yang melibatkan berbagai unit yang berisi kebijakan dan rangkaian kegiatan yang harus dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Maka evaluasi dapat dilakukan dalam kurun waktu tertentu dalam rangka mendapatkan informasi mengenai ketercapaian dari pelaksanaan suatu program. Dengan demikian dapat dimengerti bahwa evaluasi program adalah penerapan prosedur ilmiah yang sistematis untuk menilai rancangan, selanjutnya menyajikan informasi dalam rangka pengambilan keputusan terhadap implementasi dan efektifitas suatu sistem yang terencana dan berkesinambungan dengan program.¹⁵

¹⁵ Ibid. 18

Berikut penulis kemukakan beberapa pengertian dari evaluasi program menurut para ahli.¹⁶

1) Wirawan

menyatakan bahwa evaluasi sebagai riset untuk mengumpulkan, menganalisis dan menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi, menilainya dengan membandingkannya dengan indikator evaluasi dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi.

2) Met

Evaluasi program adalah metode sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menggunakan informasi untuk menjawab pertanyaan dasar tentang suatu program.

3) Burke Johnson

evaluasi program adalah penggunaan prosedur penelitian secara sistematis meneliti efektivitas dan intervensi suatu program.

4) Rossi & Freeman

Evaluasi adalah aplikasi sistematis dari metode ilmiah untuk menilai desain, implementasi, perbaikan atau hasil dari suatu program. Dengan demikian secara ringkas dikatakan bahwa evaluasi program adalah evaluasi yang dilakukan terkait dengan suatu program.

¹⁶ Ibid. 19-20

Jika melihat dan mengamati dari beberapa pengertian evaluasi program yang dikemukakan oleh para ahli di atas, dapat di ambil kesimpulan bahwa evaluasi program adalah proses yang sistematis, menggunakan informasi/data yang sudah seringkali melalui riset atau metode ilmiah, untuk menilai berbagai aspek suatu program, seperti efektivitas, implementasi, dan hasil. dengan tujuan untuk membuat keputusan atau memberikan pemahaman yang lebih baik tentang program tersebut.

1. Macam-macam Evaluasi

Penelusuran terhadap berbagai macam evaluasi menghasilkan beberapa pengertian yaitu sebagai berikut:

a. Evaluasi formatif dan evaluasi sumatif

Terdapat dua jenis evaluasi, yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif merupakan evaluasi yang dilakukan terhadap program atau kegiatan yang telah disusun, sebelum pelaksanaan program atau kegiatan tersebut. Sementara itu, evaluasi sumatif adalah kegiatan evaluasi yang dilaksanakan setelah program selesai dilaksanakan.

b. Evaluasi berkelanjutan dan evaluasi ex-post

Evaluasi yang sedang berlangsung merupakan evaluasi yang dilaksanakan pada saat program atau kegiatan masih dalam tahap pelaksanaan. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk mengetahui adanya

penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan dibandingkan dengan program atau rencana yang telah ditetapkan. Berbeda dengan evaluasi yang berkelanjutan, evaluasi ex-post sesungguhnya sejalan dengan evaluasi sumatif, yakni evaluasi yang dilakukan setelah program atau kegiatan yang direncanakan telah selesai dilaksanakan.

c. Evaluasi internal dan eksternal

Dalam evaluasi internal, pihak yang melaksanakan evaluasi adalah individu atau aparat yang terlibat langsung dengan program, seperti administrator, penanggung jawab, dan pelaksana program. Evaluasi juga dapat dilakukan oleh aparat dalam organisasi pemilik atau pelaksana program. Sedangkan evaluasi eksternal adalah suatu proses evaluasi yang dilakukan oleh pihak luar, yang tidak terafiliasi dengan organisasi pemilik atau pelaksana program. Meskipun inisiatif untuk melaksanakan evaluasi ini dapat berasal dari individu atau kelompok di luar organisasi, evaluasi tersebut juga bisa dilakukan atas permintaan dari organisasi pemilik atau pelaksana program terkait. Berdasarkan kepentingannya, baik evaluasi internal maupun eksternal dapat melaksanakan berbagai jenis evaluasi, termasuk evaluasi formatif, evaluasi sumatif,

evaluasi berkelanjutan (on-going evaluation), serta evaluasi pasca pelaksanaan (ex-post evaluation).

d. Evaluasi teknis dan evaluasi ekonomi

Dalam proses evaluasi, terdapat dua aspek penting, yaitu evaluasi teknis (fisik) dan evaluasi ekonomi (keuangan). Evaluasi teknis menilai kegiatan yang bermanfaat dengan berbagai kriteria, seperti volume kegiatan, kepatuhan terhadap persyaratan teknis, jumlah orang yang terlibat, kualitas bahan, dan hasil fisik. Sedangkan evaluasi ekonomi fokus pada manajemen keuangan dengan indikator ekonomi, seperti administrasi keuangan, realisasi pengeluaran, dan perbandingan antara manfaat dan biaya.

e. Evaluasi Program, pemantauan, dan evaluasi dampak program

1) Evaluasi program

Evaluasi program adalah kegiatan untuk menilai kembali draft program sebelum dilaksanakan. Tujuannya adalah untuk memastikan program dapat mencapai tujuan sesuai pedoman yang ada. Evaluasi ini juga membuat semua pihak merasa bertanggung jawab atas keberhasilan program. Dalam evaluasi, tidak hanya proses perumusan yang dinilai, tetapi juga semua aspek program, termasuk pengumpulan data, analisis

keadaan, perumusan masalah, dan cara mencapai tujuan, seperti kegiatan, metode, penerima manfaat, lokasi, waktu, serta sumber dana.

2) Pemantauan program

Pemantauan program adalah proses mengumpulkan informasi dan mengambil keputusan selama pelaksanaan program untuk menghindari masalah yang mengganggu, sehingga tujuan program tercapai.

3) Evaluasi dampak program

Sebagian besar kegiatan evaluasi biasanya diarahkan untuk mengevaluasi tujuan program atau dampak yang dihasilkan dari pelaksanaan program yang telah direncanakan. Kegiatan semacam ini hanya dapat dilaksanakan apabila tujuan program dirumuskan dengan jelas dan disediakan metode pengukuran yang sesuai, baik yang berkaitan dengan perubahan perilaku maupun ukuran-ukuran lainnya, seperti tingkat produktivitas, tingkat kelahiran, tingkat kematian, dan lain-lain.

f. Evaluasi proses dan evaluasi hasil

Evaluasi proses merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan suatu kegiatan sesuai dengan rencana yang telah

ditetapkan, baik dari segi kuantitatif maupun kualitatif. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa proses yang dijalankan sesuai dengan program yang telah dirumuskan. Sedangkan evaluasi hasil merupakan proses evaluasi yang dilaksanakan untuk menilai sejauh mana tujuan-tujuan yang telah direncanakan dapat dicapai, baik dari segi kuantitatif maupun kualitatif.¹⁷

2. Tujuan dan Fungsi Evaluasi Program

Pada dasarnya tujuan melakukan evaluasi program adalah untuk mengetahui sejauh mana suatu program yang telah dirancang dan direncanakan mengarah dalam mencapai tujuan program. Dengan melakukan evaluasi program maka pihak yang terkait dengan pembuat keputusan memiliki kekuatan dalam memberikan rekomendasi terhadap pelaksanaan program. Seharusnya sebuah program yang sedang dilaksanakan mengarah kepada tujuan yang telah dicanangkan baik tujuan jangka pendek, maupun jangka panjang.

Sebuah program idealnya memiliki tujuan jangka pendek dan jangka Panjang, berdasarkan tujuan ini kemudian dirancang sumberdaya yang mendukung pencapaiannya. Untuk menghindari kegagalan pencapaian tujuan program maka evaluasi pada saat program berlangsung menjadi

¹⁷ Ibid. 266-271

antisipasi yang efektif. Sebab apabila program yang dibiarkan berjalan tanpa evaluasi pada saat program berlangsung akan menyulitkan pemangku keputusan merumuskan keputusan saat program berakhir. Pembuat kebijakan hanya akan dapat menduga apa yang menyebabkan program berhasil dilaksanakan maupun dugaan apa yang menyebabkan program gagal mencapai tujuan.¹⁸

Oleh karena itu dapat dirumuskan beberapa tujuan dan fungsi evaluasi program yaitu sebagai berikut:¹⁹

- a) Sebagai pertimbangan dalam menghadirkan rekomendasi bagi pengambil keputusan terkait dengan pelaksanaan program yang sedang berlangsung maupun rekomendasi terhadap program yang telah selesai dilaksanakan.
- b) Sebagai penentu keefektifan pencapaian tujuan program, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
- c) Sebagai bahan analisis untuk menentukan kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan yang dimiliki sumberdaya program.
- d) Sumber kekuatan dalam keputusan melanjutkan, menghentikan atau bagian mana yang akan diperbaiki dari program (rekomendasi akhir).

Kalau dilihat dari beberapa penjelasan tentang tujuan dan fungsi evaluasi di atas maka dapat ditarik

¹⁸ Ibid. 25

¹⁹ Ibid. 25-26

sebuah kesimpulan, bahwa evaluasi program memiliki peran krusial dalam memberikan informasi yang komprehensif bagi para pengambil keputusan. Informasi ini mencakup efektivitas program dalam mencapai tujuannya, identifikasi kekuatan dan kelemahan sumber daya, serta rekomendasi yang jelas terkait dengan kelanjutan, penghentian, atau perbaikan program. Oleh karena itu, evaluasi program menjadi landasan penting untuk pengambilan keputusan yang lebih terukur dan berdampak positif.

3. Pendekatan dalam Evaluasi Dampak Program

Pelaksanaan evaluasi dampak program bertujuan untuk menilai tingkat efektivitas program serta pengaruhnya terhadap masyarakat yang menerima manfaat. Hal ini mencakup mereka yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program maupun yang tidak terlibat secara langsung. Oleh karena itu, data evaluasi akan dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk pelaksana kegiatan dan masyarakat yang menjadi penerima manfaat.

Kegiatan evaluasi dampak program dapat dilakukan dengan menerapkan berbagai metode, baik melalui survei, pengujian acak, maupun upaya pengumpulan informasi lainnya yang kemudian dianalisis menggunakan berbagai alat analisis yang tepat dan cermat, termasuk analisis kuantitatif yang memanfaatkan

bantuan statistik atau matematika, serta analisis kualitatif. Namun demikian, pelaksanaan evaluasi tersebut harus dilakukan oleh individu yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai, didukung oleh sumber dana yang cukup, serta memerlukan waktu yang memadai untuk melaksanakan kegiatan yang bersangkutan. Berikut ini terdapat beberapa macam pendekatan evaluasi, yaitu sebagai berikut:

1) Pendekatan Eksperimental

Pendekatan ini merancang evaluasi sebagai penelitian eksperimental yang dianggap obyektif dan hasilnya dapat digeneralisasi. Namun, ketika memberdayakan masyarakat, pendekatan ini perlu dikritisi karena sulit mengontrol eksperimen sosial dibandingkan dengan eksperimen objek mati. Dalam eksperimen sosial, sering muncul "window effect", yang membuatnya sering dianggap sebagai eksperimen semu atau "pseudo experiment".

2) Pendekatan yang berorientasi pada tujuan (goal orientation approach)

Pendekatan evaluasi ini biasa digunakan untuk menilai keberhasilan suatu kegiatan dengan fokus pada indikator pencapaian. Namun, pendekatan ini kurang memberikan informasi tentang sejauh mana proses pemberdayaan dilaksanakan dengan benar.

Evaluasi ini hanya penting untuk pencapaian tujuan, tetapi tidak cukup memberikan masukan untuk pengembangan program. Hal ini terutama terkait dengan faktor pendukung, kendala, dan alasan di balik ketidakpencapaian tujuan. Selain itu, evaluasi ini juga tidak menjelaskan bagaimana proses pemberdayaan telah berjalan.

3) Pendekatan yang berfokus pada keputusan (the decision focused approach)

Evaluasi ini ditujukan kepada pengelola program untuk membantu mereka dalam membuat keputusan tentang keberlanjutan program, termasuk perbaikan, pengembangan, dan penghentian. Rancangan evaluasi telah dibatasi pada informasi yang diperlukan oleh pengambil keputusan. Meskipun evaluasi ini bermanfaat bagi pengelola program, tidak memberikan kontribusi yang signifikan bagi peneliti atau pengamat yang ingin meniru atau mengembangkan evaluasi di waktu dan lokasi lain.

4) Pendekatan yang berorientasi pada pemakai (the user focused approach)

Evaluasi ini lebih menekankan pada penilaian mengenai sejauh mana tingkat kebermanfaatan program bagi penerima manfaat, baik dalam aspek proses, hasil, maupun dampak dari kegiatan tersebut.

Oleh karena itu, berbeda dengan pendekatan-pendekatan sebelumnya, evaluasi ini memerlukan pemahaman yang mendalam dari evaluator mengenai kebutuhan dan perasaan penerima manfaat atau pengguna. Dengan demikian, proses, kriteria, dan penilaian yang diterapkan harus berorientasi pada kepentingan penerima manfaat.

5) Pendekatan yang responsive (the responsive approach)

Pendekatan ini sangat khas, karena para evaluator diharuskan untuk mendengarkan informasi dari seluruh pemangku kepentingan sehingga dapat melakukan analisis dan sintesis melalui berbagai perspektif yang didasarkan pada beragam kepentingan. Oleh karena itu, evaluasi ini umumnya dilaksanakan dengan rancangan kualitatif yang komprehensif dan menerapkan pendekatan endemik, yakni dengan menggunakan ukuran yang relevan secara lokal.

6) Pendekatan yang bebas tujuan (goal free approach)

Pendekatan ini memberikan kebebasan dalam merumuskan tujuan dan metode evaluasi. Dikenal sebagai pendekatan tanpa tujuan, hal ini memiliki beberapa alasan, antara lain:

- a) Evaluasi dilakukan tanpa kewajiban untuk mengetahui tujuan program atau kegiatan yang sedang dinilai.
- b) Tujuan yang ditetapkan tidak membatasi ruang lingkup evaluasi.
- c) Fokus hasil evaluasi lebih kepada realitas yang terjadi daripada pada tujuan yang sudah ditentukan.
- d) Hubungan antara evaluator, pengelola, dan penerima manfaat dijaga seminimal mungkin.
- e) Pendekatan ini juga membuka peluang untuk menemukan hasil dan dampak yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya.

Oleh karena itu, disarankan agar hasil evaluasi yang menggunakan pendekatan ini dipadukan dengan hasil evaluasi yang berorientasi pada tujuan, sehingga dapat diperoleh informasi yang lebih lengkap, komprehensif, dan obyektif.²⁰

C. Perubahan Sosial

1. Pengertian Perubahan sosial

Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat dari waktu ke waktu. Perubahan ini dapat mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti nilai-nilai, norma, perilaku, lembaga

²⁰ Ibid. 283-285

sosial, dan teknologi. Konsep perubahan berhubungan dengan proses, perbedaan, dan dimensi waktu. Dengan demikian, perubahan sosial menunjuk pada suatu proses dalam sistem sosial, di mana terdapat perbedaan-perbedaan yang dapat diukur dan diamati dalam kurun waktu tertentu. Perubahan yang terjadi lebih ke arah kemajuan (progres) atau kemunduran (regres). Perubahan sosial ke arah kemajuan identik dengan konsep pembangunan (development), yang pada umumnya merupakan dampak yang dikehendaki (functional). Sebaliknya, kemunduran merupakan hasil yang tidak dikehendaki dalam masyarakat (dysfunctional).²¹

Berikut ini ada beberapa pengertian tentang perubahan sosial yang diungkapkan oleh para ahli, antara lain sebagai berikut.

1. Perubahan sosial sebagai suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan-perubahan kondisi geo-grafis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi, maupun karena difusi penemuan-penemuan baru dalam masyarakat.
2. Perubahan sosial menunjuk pada modifikasi-modifikasi yang terjadi pada pola kehidupan manusia, di mana modifikasi ini muncul karena sebab intern maupun ekstern.

²¹ Prof. Dr. Agus Suryono, S.U., *Teori & Strategi Perubahan Sosial*, (Jakarta Timur: PT Bumi Aksara, 2020). 26

3. Perubahan sosial adalah berbagai perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang memengaruhi sistem sosialnya termasuk nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku di antara berbagai kelompok dalam masyarakat.
4. Perubahan sosial memfokuskan diri pada perubahan dalam struktur sosial, yaitu perubahan pola-pola perilaku dan interaksi sosial.
5. Perubahan sosial merupakan konsep yang kompleks, dan men-cakup pada perubahan fenomena sosial di berbagai tingkat kehidupan manusia mulai dari tingkat individual hingga ke tingkat dunia.²²

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan bahwa secara umum perubahan sosial dapat diartikan sebagai proses perubahan dalam berbagai aspek sosial, pada kehidupan masyarakat yang terjadi dalam kurun waktu tertentu. Perubahan aspek-aspek sosial yang penting dalam kehidupan masyarakat misalnya perubahan dalam nilai dan norma sosial, proses-proses sosial, pola perilaku sosial dan gaya hidup (lifestyle), serta stratifikasi sosial dan kelembagaan masyarakat.

2. Bentuk-Bentuk Perubahan Sosial

Berikut ini akan dijelaskan mengenai bentuk-bentuk perubahan sosial dan contohnya. Bentuk perubahan sosial

²² Ibid. 27

adalah salah satu wujud dari perkembangan manusia, yang selalu bergerak secara dinamis mengikuti perkembangan zaman yang ada. Tentunya teori perubahan sosial ini didasarkan pada tingkah laku manusia yang selalu berubah-ubah dari waktu ke waktu.²³

Berikut ini ada beberapa bentuk perubahan sosial, di antaranya se-bagai berikut:

1. Bentuk Perubahan Sosial Berdasarkan Prosesnya

Perubahan sosial berdasarkan prosesnya terdapat dua bentuk, yaitu berikut:

a) Perubahan yang direncanakan (Planned-Change).

Perubahan yang direncanakan merupakan perubahan yang terorgani-sasi secara baik. Perubahan ini dilakukan oleh pihak yang menginginkan perubahan, yang disebut agent of change (agen perubahan). Agent of change melakukan perencanaan terlebih dahulu, untuk mewujudkan perubahan sosial dalam masyarakat. Suatu perubahan yang direncanakan selalu berada dalam kendali agent of change. Perubahan yang akan dilakukan biasanya diawali dengan perencanaan sosial (social planning).

b) Perubahan yang tidak direncanakan (Unplanned Change).

²³ Ibid. 31

Perubahan yang tidak direncanakan terjadi di luar rencana atau per-kiraan masyarakat. Perubahan ini dapat menimbulkan dampak-dampak yang merugikan masyarakat. Terkadang perubahan yang tidak direncanakan mengiringi perubahan yang direncanakan.

2. Perubahan berdasarkan waktunya.

Berdasarkan sudut pandang waktu, perubahan sosial dibedakan sebagai berikut:

a) Perubahan Secara Cepat (Revolusi)

Perubahan secara cepat disebut revolusi, yaitu perubahan sosial yang terjadi dalam waktu singkat, cepat, dan mendasar. Disebut sebagai perubahan secara cepat dan mendasar, karena perubahan ini tentunya menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan pranata sosial yang sulit diubah.

b) Perubahan Secara Lambat (Evolusi)

Perubahan secara lambat disebut evolusi. Evolusi adalah perubahan yang berlangsung lama dan sering tanpa perencanaan. Perubahan ini mampu timbul dengan penyesuaian-penyesuaian panjang, yang dilakukan oleh masyarakat secara bertahap secara alami (redudency social).

3. Perubahan Sosial Berdasarkan Dampaknya

Berdasarkan dampaknya, perubahan sosial dapat dibedakan menjadi perubahan kecil dan perubahan besar.

a) Perubahan Kecil (Incremental Change)

Perubahan kecil merupakan perubahan dalam lingkup sempit yang terjadi dalam masyarakat. Perubahan ini berdampak pada sebagian kecil masyarakat, atau tidak memberi pengaruh terhadap struktur sosial masyarakat secara luas dan keseluruhan.

b) Perubahan Besar (Comprehensive Change)

Perubahan besar memiliki pengaruh besar terhadap struktur sosial yang ada dalam masyarakat. Perubahan ini berakibat langsung dalam masyarakat.

4. Perubahan Sosial Berdasarkan Cara atau Metode

Berdasarkan caranya perubahan sosial dapat dibedakan menjadi perubahan dengan kekerasan dan tanpa kekerasan.

a) Perubahan dengan Kekerasan (Violence, Unvoluntary, Coercive)

Perubahan dengan kekerasan adalah perubahan sosial yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis yang bertujuan demi tercapainya perubahan yang diinginkan. Perubahan dengan cara kekerasan sering dilakukan untuk mempercepat proses perubahan seperti yang diinginkan.

b) Perubahan Tanpa Kekerasan (Nonviolence, Voluntary, Persuasif)

Perubahan tanpa kekerasan adalah perubahan yang dilakukan dengan jalan damai, mengajak, dan simpati untuk mencapai perubahan yang diinginkan. Perubahan tanpa kekerasan atau dengan sukarela memerlukan proses cukup panjang sehingga terkadang agen perubahan tidak sabar, dan akhirnya memilih perubahan dengan kekerasan atau dengan tekanan-tekanan (pressure).

5. Perubahan Berdasarkan Sifat Perubahannya

Berdasarkan sifat perubahannya, perubahan sosial secara garis besar dapat dibedakan sebagai berikut.

a) Perubahan Struktural

Proses perubahan struktural dilakukan untuk menciptakan dan menghasilkan perubahan mendasar.

b) Perubahan Fungsional dan Perubahan Kultural

Pada umumnya, perubahan struktural akan diikuti dengan perubahan fungsional kerja (functional change) dan perubahan budaya kerja (cultural change).

6. Perubahan untuk Tujuan Penyempurnaan (Amandemen)

Perubahan untuk tujuan penyempurnaan salah satunya adalah perubahan proses (tidak mendasar). Perubahan proses atau sering kali disebut dengan

perubahan tidak mendasar, merupakan perubahan yang sifatnya penyempurnaan untuk mengatasi keadaan tertentu. Artinya, perubahan tersebut hanya menyempurnakan perubahan yang sebelumnya sudah ada.

7. Perubahan Sosial Berdasarkan Sisi Kemajuan dan Kemunduran Arahnya

Apabila dilihat dari sisi kemajuan dan kemunduran arahnya, perubahan sosial dapat dibedakan sebagai berikut.

a) Perubahan Progres (Maju)

Perubahan progres merupakan perubahan yang membawa kemajuan pada masyarakat. Perubahan progres cenderung merupakan perubahan yang dikehendaki/diharapkan oleh masyarakat

b) Perubahan Regres (Mundur)

Apabila suatu perubahan ternyata tidak menguntungkan bagi masyarakat maka niscaya perubahan tersebut dianggap kemunduran. Perubahan sosial yang dianggap kemunduran bagi masyarakat disebut dengan perubahan sosial regres.²⁴

3. Faktor Pendorong dan Penghambat Perubahan Sosial

Selain faktor penyebab terjadinya perubahan sosial, juga terdapat beberapa faktor lain yang mengakibatkan

²⁴ Ibid. 31-35

suatu perubahan sosial itu dapat berlangsung cepat atau lambat. Faktor yang mempercepat atau memperlancar proses perubahan sosial disebut faktor pendorong. Sedangkan faktor yang memperlambat proses perubahan sosial sering disebut faktor penghambat perubahan sosial. Berikut penjelasannya lebih lanjut.

a. Faktor Pendorong Perubahan Sosial

Adapun faktor-faktor pendorong proses perubahan sosial meliputi hal-hal berikut.

1. Adanya kontak antarbudaya

Terjadinya kontak antarbudaya akan menimbulkan difusi, yaitu menyebarnya unsur-unsur budaya baru dalam masyarakat.

2. Sistem pendidikan yang semakin maju

Pendidikan mengajarkan untuk dapat berpikir secara objektif-rasional sehingga memberikan kemampuan untuk menilai, apakah kebudayaan masyarakat akan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan zaman atau tidak. Dengan semakin majunya pendidikan masyarakat maka perilaku masyarakat juga akan mengalami perubahan.

3. Sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan untuk maju

Dengan adanya kondisi tersebut maka akan mendorong terjadinya penemuan baru dalam

masyarakat. Dengan demikian, adanya dorongan tersebut akan mempercepat terjadinya perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat.

4. Toleransi masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan menyimpang

Toleransi atau pembiaran terhadap penyimpangan-penyimpangan perilaku (delinquency) dalam masyarakat, akan mengakibatkan berbagai penguatan terhadap kebiasaan baru walaupun bertentangan (kontras) dengan tradisi lama. Kebebasan dan penentangan terhadap nilai-nilai dan norma-norma lama, akan mudah masuk dalam kehidupan masyarakat sebagai nilai dan norma baru. Dengan demikian, secara langsung atau tidak langsung, dan cepat atau lambat akan memengaruhi kehidupan masyarakat itu sendiri.

5. Sistem pelapisan sosial yang semakin terbuka

Pelapisan sosial yang terbuka akan mendorong setiap individu untuk melakukan mobilitas, dalam rangka meningkatkan status sosialnya. Setiap individu akan berusaha untuk melakukan identifikasi terhadap individu lain, yang dianggap memiliki status sosial yang lebih tinggi.

6. Penduduk yang heterogen

Keadaan masyarakat yang berada dalam kelompok yang berbeda-beda akan mendorong terjadinya berbagai pertentangan. Dengan terjadinya pertentangan tersebut maka akan mempercepat terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat. Selain itu, adanya perbedaan sering kali akan mendorong terjadinya akulturasi dalam masyarakat.

7. Ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang ke-hidupan tertentu

Ketidakpuasan dan kekecewaan yang berlangsung lama dalam suatu masyarakat memberikan peluang terjadinya perubahan sosial, seperti yang telah dipaparkan sebelumnya yaitu dapat menciptakan gerakan evolusi, revolusi, dialektika, dan sebagainya.

8. Berorientasi masa depan

Dalam banyak hal, cara berpikir yang berorientasi pada masa depan ada hubungannya dengan visi yang ingin dicapai, oleh suatu institusi dan masyarakat. Untuk mewujudkan harapan ke depan dari institusi dan masyarakat tersebut tidak ada jalan lain kecuali harus melakukan gerakan perubahan (restorasi), ke

arah kondisi yang lebih baik dan lebih maju dibandingkan keadaan sebelumnya.

b. Faktor Penghambat Perubahan Sosial

Adapun faktor-faktor penghambat dari proses perubahan sosial mencakup beberapa hal berikut.

a) Kurangnya hubungan antarmasyarakat

Kondisi geografis yang terisolir (faktor orbitasi) dapat berakibat kurangnya hubungan masyarakat dengan dunia luar sehingga masyarakat menjadi terasing, terpinggir, dan tertinggal. Kehidupan tersebut tentu mengakibatkan masyarakat tidak mengetahui perkembangan-perkembangan apa yang terjadi pada masyarakat lain, yang mungkin akan memperkaya dan akan meningkatkan kemajuannya sendiri.

b) Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lambat

Perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat juga akan berpengaruh terhadap perubahan dalam masyarakat yang juga semakin lambat. Perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat ini diakibatkan oleh beberapa hal, seperti masyarakat yang terasing dan tertutup,

terbatasnya prasarana pendidikan, dan sebagainya.

c) Sikap masyarakat yang konservatif

Sikap chauvinisme dan eksklusif (cara berpikir sempit dan tertutup) akan menghambat jalannya proses perubahan. Keadaan itu akan lebih parah jika dalam masyarakat tersebut dikuasai oleh golongan konservatif atau kelompok ortodoks yang tidak menyukai adanya perubahan

d) Adanya kepentingan-kepentingan pribadi atau kelompok yang kuat

Dalam masyarakat pasti terdapat pelapisan sosial yang memiliki vested interest yang kuat. Mereka tidak mau terganggu dan diganggu. Mereka berusaha mempertahankan status dan kekuasaan mereka secara turun-temurun (askripsi). Pada masyarakat transisi, mereka menganggap sebagai golongan pelopor perubahan (agent of change).

e) Rasa takut terhadap perubahan

Rasa takut terhadap perubahan akan mengakibatkan masyarakat cenderung untuk melindungi diri secara berlebihan (overprotective). Hal ini akan mengakibatkan sulitnya proses akulturasi, yang pada akhirnya

mengakibatkan semakin sulitnya terjadi perubahan dalam kehidupan masyarakat.

- f) Prasangka negatif terhadap hal baru dan asing
Prasangka negatif ini muncul akibat adanya traumatik yang ditimbulkan oleh masyarakat luar terhadap masyarakat tersebut. Hal ini kemudian mengakibatkan masyarakat tersebut akan berperilaku lebih tertutup, atau tidak mudah percaya dengan nilai-nilai baru dari masyarakat luar.
- g) Hambatan ideologis
Ideologi adalah suatu pandangan yang telah diakui kebenarannya oleh masyarakat sehingga sulit berubah dan dipengaruhi. Oleh karena itu, usaha-usaha untuk menuju perubahan terutama pada unsur-unsur perubahan kebudayaan dan ideologi, biasanya akan diartikan sebagai usaha perlawanan terhadap nilai-nilai (ideologi) yang selama ini dianut oleh masyarakat, dan sudah menjadi dasar integritas masyarakat tersebut.
- h) Nilai pasrah kepada nasib (fatalistik)
Pada umumnya nilai-nilai kepasrahan terhadap nasib bersifat statis dan memiliki etos kerja yang rendah. Mereka kurang mau berusaha untuk merubah kondisi dan nasib mereka ke arah yang

lebih baik. Ini merupakan suatu budaya yang dapat menimbulkan kemiskinan, keterbelakangan, dan kebodohan dalam masyarakat.²⁵

Dari penjelasan di atas menjelaskan beberapa faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial maka dapat di ambil kesimpulan bahwa, perubahan sosial didorong oleh kontak antarbudaya, pendidikan maju, penghargaan karya dan keinginan maju, toleransi penyimpangan, sistem pelapisan sosial terbuka, masyarakat heterogen, ketidakpuasan, dan orientasi masa depan. Sebaliknya, perubahan sosial dihambat oleh kurangnya hubungan antarmasyarakat, perkembangan ilmu dan teknologi lambat, sikap konservatif, kepentingan pribadi/kelompok kuat, rasa takut pada perubahan, prasangka negatif terhadap hal baru, hambatan ideologis, dan nilai pasrah pada nasib.

D. Pemberdayaan

a. Pengertian Pemberdayaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “pemberdayaan” berasal dari kata “daya” yang berarti kemampuan dalam melakukan sesuatu atau kemampuan untuk bertindak.²⁶ sebab pemberdayaan adalah upaya untuk memberikan kekuatan dan kemampuan kepada

²⁵ Ibid. 35-41

²⁶ Ni Putu Sri Harta Mimba, S.E., M.Si., Ph.D., Ak., Ca., Cma., *Pemberdayaan Umkm Berbasis Budaya*, (Yogyakarta: Deepublish (Group Penerbitan Cv Budi Utama, 2024). 19

masyarakat. Proses ini dapat dipahami sebagai usaha untuk memandirikan, mengembangkan, dan memperkuat posisi tawar masyarakat, terutama bagi kelompok-kelompok tingkat bawah, dalam menghadapi berbagai kekuatan penekan di berbagai bidang kehidupan. Melalui pemberdayaan, diharapkan pengambilan keputusan dapat dilimpahkan kepada masyarakat, sehingga mereka bisa terbiasa dan mampu bertanggung jawab terhadap pilihan-pilihan yang mereka ambil.²⁷

Melihat berbagai pemahaman dan pengertian mengenai pemberdayaan yang ada, pada dasarnya hal ini hanya membahas bagaimana individu, kelompok, atau komunitas berusaha untuk mengendalikan kehidupan mereka sendiri dan berupaya membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Dengan kata lain, pengertian pemberdayaan adalah kekuatan untuk membentuk masa depan mereka sendiri.²⁸ karena pemberdayaan adalah kunci untuk menciptakan perubahan positif dalam masyarakat. Sebab dengan memberdayakan individu dan kelompok, kita dapat

²⁷ Afriansyah, Dkk, Pemberdayaan Masyarakat, (Sumatera Barat: Pt Global Eksekutif Teknologi Anggota Ikapi No. 033/Sba/2022). 5

²⁸ Isbandi Ni Putu Sri Harta Mimba, S.E., M.Si., Ph.D., Ak., Ca., Cma., Pemberdayaan Umkm Berbasis Budaya, (Yogyakarta: Deepublish (Group Penerbitan Cv Budi Utama, 2024). 19

²⁸ Afriansyah Rukminto Adi, Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas (Pengantar pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2003). 58

membangun masyarakat yang lebih kuat, adil, dan berkelanjutan.

b. Tahapan Pemberdayaan

proses pemberdayaan (*empowering society*), Proses ini terdiri dari tiga aktivitas penting. Pertama, membebaskan dan menyadarkan masyarakat. Kegiatan ini bersifat subyektif dan berpihak kepada kelompok yang lemah atau tertindas, dengan tujuan memfasilitasi mereka dalam menjalani proses penyadaran. Hal ini diharapkan dapat memicu upaya untuk membebaskan diri dari kemiskinan dan ketertinggalan. Kedua, mendorong masyarakat untuk mengidentifikasi masalah yang mereka hadapi. Ketiga, menggugah partisipasi dan semangat swadaya masyarakat, sehingga mereka dapat memanfaatkan kemampuan yang dimiliki untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.²⁹ Selain itu proses Pemberdayaan juga akan dilakukan oleh Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 PP No 7 Tahun 2021 dan dilaksanakan secara terintegrasi dengan lembaga lain.³⁰

²⁹ Aziz Muslim, *Metodologi Pengembangan Masyarakat*, (Yogyakarta: Penerbit TERAS Komplek POLRI Gowok Blok D 2 No. 186, 2009). 3

³⁰ Ahmad Redi, Luthfi Marfugah, Rayhan Fiqi Fansuri, Michelle Prawira, Agatha Lafentia". *Perizinan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umk) Sebagai Bentuk Pemberdayaan, Perlindungan Hukum Dan*

Adapun beberapa tahapan kegiatan pemberdayaan dapat dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut:

1. Tahap penetapan dan pengenalan wilayah kerja:

Sebelum melaksanakan kegiatan, pengaturan wilayah kerja perlu melibatkan kesepakatan antara Tim Fasilitator, aparat pemerintah setempat, perwakilan masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya seperti pelaku bisnis, tokoh masyarakat, aktivis LSM, dan akademisi. Proses ini penting bukan hanya untuk menghindari potensi gesekan atau konflik kepentingan di antara semua pihak, tetapi juga untuk membangun sinergi dan mendapatkan dukungan melalui partisipasi dari seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, keberhasilan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang direncanakan dapat terwujud dengan baik.

2. Tahap sosialisasi kegiatan:

Upaya ini bertujuan untuk mengkomunikasikan rencana kegiatan pemberdayaan masyarakat yang akan dilaksanakan di wilayah tersebut. Dalam proses sosialisasi, penting untuk menyampaikan informasi mengenai pihak-pihak terkait yang diharapkan dapat berpartisipasi atau terlibat, serta menjelaskan

pembagian peran yang diinginkan. Selain itu, akan diuraikan pendekatan, strategi, dan langkah-langkah yang akan diambil.

3. Tahap penyadaran masyarakat:

dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai "keberadaan mereka," baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari komunitas. Hal ini mencakup pemahaman terhadap kondisi lingkungan yang meliputi aspek fisik, teknis, sosial-budaya, ekonomi, dan politik.

4. Tahap Pengorganisasian masyarakat:

Termasuk di dalamnya adalah pemilihan pemimpin serta pembentukan kelompok-kelompok tugas yang diperlukan. Pengorganisasian masyarakat sangat penting untuk dilakukan, karena untuk mencapai perubahan dan mengatasi masalah, seringkali kita tidak dapat bertindak secara individu. Proses ini memerlukan kolaborasi dan pengorganisasian dalam masyarakat.

5. Tahap Pelaksanaan kegiatan yang terdiri dari:

a. Berbagai program pelatihan dirancang untuk meningkatkan dan memperbaiki pengetahuan teknis, keterampilan manajerial, serta mengubah sikap dan wawasan.

b. Pengembangan kegiatan ini terutama bertujuan untuk meningkatkan pendapatan, serta melindungi, melestarikan, dan memperbaiki atau merehabilitasi sumber daya alam. Selain itu, juga fokus pada pengembangan efektivitas kelembagaan.

6. Advokasi Kebijakan:

Segala upaya pemberdayaan masyarakat, seperti peningkatan pendapatan dan penguatan posisi tawar, memerlukan dukungan kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan advokasi sangat penting untuk memperoleh dukungan politik dan legitimasi dari berbagai elit di masyarakat, seperti aparat pemerintah, pelaku bisnis, tokoh masyarakat, pegiat LSM, dan akademisi.

7. Politisasi:

Dalam konteks ini, penting untuk secara konsisten memelihara dan meningkatkan posisi tawar melalui kegiatan politik yang praktis. Upaya ini diperlukan untuk mendapatkan dan mempertahankan legitimasi, sekaligus memastikan keberlanjutan dari kebijakan yang ingin dicapai melalui pemberdayaan masyarakat.³¹

³¹ Ibid. 127-129

c. Tujuan Pemberdayaan

Pemberdayaan bertujuan untuk memungkinkan semua individu dalam masyarakat menjadi agen pembangunan mereka sendiri, dengan kemampuan dan otonomi mereka sendiri. Sebab koperasi hanya sebagai organisasi yang membantu masyarakat miskin untuk membantu dirinya sendiri. Pemberdayaan hanya dapat menciptakan lapangan kerja, mengurangi jumlah pemungut pajak, meningkatkan pendapatan usaha bagi masyarakat miskin, mengurangi kemiskinan, dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.³² Karena pemberdayaan merupakan suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, kemandirian, dan kemampuan UMKM dalam mengelola usahanya secara lebih efektif dan efisien agar mampu bertahan, berkembang, dan bersaing dalam pasar yang semakin kompleks.³³ Sebab dengan adanya pemberdayaan dapat memperkuat sebuah kelompok di masyarakat secara sosial ekonomi, sehingga mereka bisa lebih mandiri dan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sekaligus berperan dalam pembangunan masyarakat.

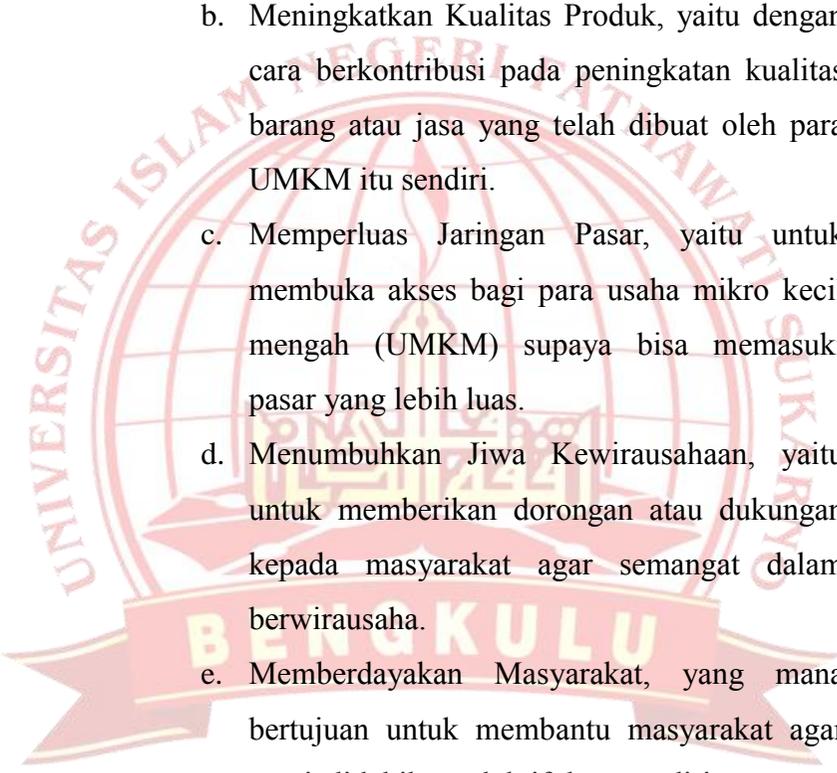
³² Khusnul Khotimah", Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Zakat Produktif Melalui Koperasi Syari'ah (Studi Kasus Social Trust Fund Dompot Dhuafa)". Skripsi. (Jakarta: Fakultas Hukum Ekonomi Syariah, 2020). 49-50

³³ Endang Ayu Wulandari", Strategi Pemberdayaan Umkm Lazismu Diy Dalam Pendampingan Bisnis (Empowering Strategies Of Lazismu Diy For Supporting Small And Medium In Business)". Skripsi. (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Agama Islam, 2024). 26-27

Tujuan yang dicapai melalui pemberdayaan adalah untuk memungkinkan individu atau kelompok menjadi mandiri. Kemandirian mencakup kemandirian dalam berpikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang dilakukan. Kemandirian dari masyarakat adalah keadaan yang dialami masyarakat yang menggunakan keterampilannya, yang terdiri dari keterampilan kognitif dan kreatif, untuk berpikir dan mengambil keputusan yang dianggap tepat untuk mencapai solusi terhadap masalah yang dihadapinya, yang ditandai dengan kemampuan untuk melakukan sesuatu. Tujuan mendasar dari pemberdayaan adalah keadilan sosial melalui pemberian perdamaian kepada masyarakat yang lebih luas, dan keadilan politik dan sosial melalui upaya saling membantu dan belajar dalam mengembangkan langkah-langkah kecil untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Dengan kata lain Pemberdayaan mempunyai tujuan jangka pendek dan jangka panjang.³⁴

Adapun tujuan dari pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Bengkulu, yaitu sebagai berikut:

³⁴ Rosita Dwi Rahmawati "Pemberdayaan Masyarakat Dengan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm) D'lima Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga di Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur". Skripsi. (Lampung: Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi, 2024). 18-19

- 
- a. Meningkatkan Pendapatan, yang mana bertujuan untuk membantu mustahik dalam meningkatkan pendapatannya melalui pengembangan usaha yang telah dijalankannya.
 - b. Meningkatkan Kualitas Produk, yaitu dengan cara berkontribusi pada peningkatan kualitas barang atau jasa yang telah dibuat oleh para UMKM itu sendiri.
 - c. Memperluas Jaringan Pasar, yaitu untuk membuka akses bagi para usaha mikro kecil menengah (UMKM) supaya bisa memasuki pasar yang lebih luas.
 - d. Menumbuhkan Jiwa Kewirausahaan, yaitu untuk memberikan dorongan atau dukungan kepada masyarakat agar semangat dalam berwirausaha.
 - e. Memberdayakan Masyarakat, yang mana bertujuan untuk membantu masyarakat agar menjadi lebih produktif dan mandiri.

d. Kemandirian Masyarakat

Kemandirian berasal dari kata “Autonomy” yaitu sebagai sesuatu yang mandiri, atau kesanggupan untuk berdiri sendiri dengan keberanian dan tanggung jawab atas segala tingkah laku sebagai manusia dewasa dalam

melaksanakan kewajibannya guna memenuhi kebutuhannya sendiri. Kemandirian merupakan suatu sikap otonomi bahwa seseorang secara relative bebas dari pengaruh penilaian, pendapat dan keyakinan orang lain. Yang mana kemandirian adalah kebebasan individu untuk dapat menjadi orang yang berdiri sendiri, dapat membuat rencana untuk masa sekarang dan masa yang akan datang serta bebas dari pengaruh orangtua. Sebab individu yang mandiri akan mempunyai kepercayaan terhadap gagasan-gagasannya sendiri dan kemampuan menyelesaikan sesuatu hal sampai tuntas, dan tidak ada keragu-raguan dalam menetapkan tujuan serta tidak dibatasi oleh kekuatan akan kegagalan.³⁵

Ada empat hal penting yang terdapat dalam pengertian kemandirian, yaitu:

1. suatu keadaan dimana seseorang yang memiliki hasrat bersaing untuk maju demi kebaikan dirinya.
2. mampu mengambil keputusan dan inisiatif untuk mengatasi masalah yang dihadapi
3. memiliki kepercayaan diri dalam mengerjakan tugas-tugas.
4. dan bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya.

³⁵ Dr. Dinie Ratri Desiningrum, *Sukses Dalam Kemandirian*, (Semarang: Jl. Prof. Sudarto LPPU II 12A, Tembalang, Semarang, 2022). 1

Berpegang pada prinsip pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk memandirikan masyarakat dan meningkatkan taraf hidupnya, maka arah kemandirian masyarakat adalah berupa pendampingan untuk menyiapkan masyarakat agar benar-benar mampu mengelola sendiri kegiatannya.³⁶ Sebab tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah proses. Melalui proses belajar maka secara bertahap masyarakat akan memperoleh kemampuan atau daya dari waktu ke waktu. Berikut ini ada beberapa prinsip dasar untuk mewujudkan masyarakat yang berdaya atau mandiri yaitu:

1. Penyadaran

Untuk dapat maju atau melakukan sesuatu, orang harus dibangunkan dari tidurnya. Demikian masyarakat juga harus dibangunkan dari tidur keterbelakangannya, dari kehidupannya sehari-hari yang tidak memikirkan Masa depannya. Orang yang pikirannya tertidur merasa tidak mempunyai

³⁶ Prof. Dr. Ir. Totok Mardikanto, M.S. Dr. Ir. H. Poerwoko Soebiato, M.Si., *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, Cv, 2017). 127

masalah, karena mereka tidak memiliki aspirasi dan tujuan-tujuan yang harus diperjuangkan. Penyadaran berarti bahwa masyarakat secara keseluruhan menjadi sadar bahwa mereka mempunyai tujuan-tujuan dan masalahmasalah. Masyarakat yang sadar juga mulai menemukan peluang-peluang dan memanfaatkannya, menemukan sumberdaya-sumberdaya yang ada ditempat itu yang barangkali sampai saat ini tak pernah dipikirkan orang.

Masyarakat yang sadar menjadi semakin tajam dalam mengetahui apa yang sedang terjadi baik di dalam maupun diluar masyarakatnya. Masyarakat menjadi mampu merumuskan kebutuhan-kebutuhan dan aspirasinya.

2. Pelatihan

Pendidikan disini bukan hanya belajar membaca, menulis dan berhitung, tetapi juga meningkatkan keterampilan keterampilan bertani, kerumahtanggaan, industri dan cara menggunakan pupuk. Juga belajar dari sumber-sumber yang dapat diperoleh untuk mengetahui bagaimana memakai jasa bank, bagaimana membuka rekening dan memperoleh pinjaman. Belajar tidak hanya dapat dilakukan melalui sekolah, tapi juga melalui pertemuan-pertemuan informal dan diskusi-diskusi

kelompok tempat mereka membicarakan masalahmasalah mereka.

Melalui pendidikan, kesadaran masyarakat akan terus berkembang. Perlu ditekankan bahwa setiap orang dalam masyarakat harus mendapatkan pendidikan, termasuk orangtua dan kaum wanita. Ide besar yang terkandung dibalik pendidikan kaum miskin adalah bahwa pengetahuan menganggarkan kekuatan

3. Pengorganisasian

Agar menjadi kuat dan dapat menentukan nasibnya sendiri, suatu masyarakat tidak cukup hanya disadarkan dan dilatih ketrampilan, tapi juga harus diorganisir. Organisasi berarti bahwa segala hal dikerjakan dengan cara yang teratur, ada pembagian tugas diantara individu-individu yang akan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas masing-masing dan ada kepemimpinan yang tidak hanya terdiri dari beberapa gelintir orang tapi kepemimpinan diberbagai tingkatan.

Masyarakat tidak mungkin diorganisir tanpa pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan secara rutin untuk mengambil keputusan-keputusan dan melihat apakah keputusan-keputusan tersebut dilaksanakan. Wakil-wakil dari semua kelompok

harus berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan. Selain pertemuan-pertemuan rutin, catatlah keputusan-keputusan yang telah diambil. Notulen itu akan dibacakan dalam pertemuan berikutnya untuk mengetahui apakah orang-orang yang bertanggungjawab terhadap keputusan tersebut sudah melaksanakan tugasnya atau belum

Tugas-tugas harus dibagikan pada berbagai kelompok, termasuk kaum muda, kaum wanita, dan orangtua. Pembukuan yang sehat juga sangat penting. Semua orang harus mengetahui penggunaan uang dan berapa sisanya. Pembukuan harus dikontrol secara rutin misalnya setiap bulan untuk menghindari adanya penyelewengan.

4. Pengembangan kekuatan

Kekuasaan berarti kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Bila dalam suatu masyarakat tidak ada kesadaran, latihan atau organisasi, orang-orangnya akan merasa tak berdaya dan tak berkekuatan. Mereka berkata kami tidak bisa, kami tidak punya kekuatan. Pada saat masyarakat merasa memiliki potensi atau kekuatan, mereka tidak akan mengatakan lagi, kami tidak bisa, tetapi mereka akan berkata kami mampu. Masyarakat menjadi percaya diri. Nasib mereka berada di tangan

mereka sendiri. Pada kondisi seperti ini bantuan yang bersifat fisik, uang, teknologi dsb. Hanya sebagai sarana perubahan sikap. Bila masyarakat mempunyai kekuatan, setengah perjuangan untuk pembangunan sudah dimenangkan. Tetapi perlu ditekankan kekuatan itu benar-benar dari masyarakat bukan dari satu atau dua orang pemimpin saja. Kekuatan masyarakat harus mengontrol kekuasaan para pemimpin.

5. Membangun dinamika

Dinamika orang miskin berarti bahwa masyarakat itu sendiri yang memutuskan dan melaksanakan program-programnya sesuai dengan rencana yang sudah digariskan dan diputuskan sendiri. Dalam konteks ini keputusan-keputusan sedapat mungkin harus diambil di dalam masyarakat sendiri, bukan diluar masyarakat tersebut. Lebih jauh lagi, keputusan-keputusan harus diambil dari dalam masyarakat sendiri. Semakin berkurangnya kontrol dari masyarakat terhadap keputusan-keputusan itu, semakin besarlah bahaya bahwa orang-orang tidak mengetahui keputusan-keputusan tersebut atau bahkan keputusan-keputusan itu keliru. Hal prinsip

bahwa keputusan harus diambil sedekat mungkin dengan tempat pelaksanaan atau sasaran.³⁷

Untuk mewujudkan kemandirian dalam Masyarakat bukanlah sesuatu yang ada dengan sendirinya atau langsung seperti barang jadi, tetapi merupakan hasil dari proses pemberdayaan yang berkelanjutan.³⁸ Sebab pada hakikatnya pemberdayaan masyarakat adalah untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya. Dalam proses tersebut masyarakat bersama-sama melakukan hal-hal berikut:

- a. Mengidentifikasi dan mengkaji potensi wilayah, permasalahan, serta peluang-peluangnya. Kegiatan ini dimaksudkan agar masyarakat mampu dan percaya diri dalam mengidentifikasi serta menganalisa keadaannya, baik potensi maupun permasalahannya. Pada tahap ini diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai aspek sosial, ekonomi dan kelembagaan.
- b. Menyusun rencana kegiatan kelompok, berdasarkan hasil kajian, meliputi:

³⁷ Herning Suryo. "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Kemandirian Masyarakat." Jurnal ilmiah komunitas, pemberdayaan, mandiri, Vol Halaman 1-55, 2019, 47-48

³⁸ Hairudin la patilaiya, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Sumatra Barat: Jl. Pasir Sebelah No. 30 RT 002 RW 001 Kelurahan Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tengah Padang Sumatera Barat, 2022). 121

- 1) Memprioritaskan dan menganalisa masalah-masalah
 - 2) Identifikasi alternatif pemecahan masalah yang terbaik
 - 3) Identifikasi sumberdaya yang tersedia untuk pemecahan masalah
 - 4) Pengembangan pelaksanaannya. rencana kegiatan serta pengorganisasian
- c. Menerapkan rencana kegiatan kelompok: Rencana yang telah disusun bersama dengan dukungan fasilitasi dari pendamping selanjutnya diimplementasikan dalam kegiatan yang konkrit dengan tetap memperhatikan realisasi dan rencana awal. Termasuk dalam kegiatan ini adalah, pemantauan pelaksanaan dan kemajuan kegiatan menjadi perhatian semua pihak, selain itu juga dilakukan perbaikan jika diperlukan
- d. Memantau proses dan hasil kegiatan secara terus menerus secara partisipatif (participatory monitoring and evaluation/PME). PME ini dilakukan secara mendalam pada semua tahapan pemberdayaan masyarakat agar prosesnya berjalan sesuai dengan tujuannya. PME adalah suatu proses penilaian, pengkajian dan pemantauan kegiatan, baik prosesnya

(pelaksanaan) maupun hasil dan dampaknya agar dapat disusun proses perbaikan kalau diperlukan.³⁹

E. Zakat Produktif

1. Pengertian Zakat Produktif

Berbicara masalah zakat produktif memang masih memerlukan kepada suatu batasan dan definisi tersendiri. Selama ini, istilah zakat produktif belum tersosialisasi dengan baik disebabkan kurangnya penerapan dan praktek dari masyarakat itu sendiri. Disamping itu, adanya keraguan tentang boleh tidaknya sistem tersebut diamalkan atau dengan kata lain masalah ini termasuk dalam hal ijtihad. Dilihat dari segi aplikasi kegiatan ini, dapat dikatakan sebagai aktivitas aktivitas usaha masyarakat yang bisa menghasilkan keuntungan atau laba, seperti perdagangan, pertanian, peternakan, pertukangan dan sebagainya.

Jika dirujuk kepada al-Qur'an dan Hadits serta pandangan para ulama, kita dapat menemukan suatu pandangan bahwa zakat produktif tersebut dibolehkan, meskipun tidak dikatakan sangat dianjurkan untuk dipraktekkan. Misalnya penafsiran yang bisa dilakukan dari firman Allah dalam surat al-Taubah ayat 103. Dalam ayat tersebut terdapat lafaz tuzakkihim yang berasal dari

³⁹ Prof. Dr. Ir. Totok Mardikanto, M.S. Dr. Ir. H. Poerwoko Soebiato, M.Si., *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, Cv, 2017). 125

kata zakka, yang artinya menyucikan dan bisa pula berarti mengembangkan.⁴⁰ Adapun pengembangan itu sendiri bisa ditinjau dari dua aspek, yaitu:

Pertama, aspek spritual. Allah akan melipatgandakan pahala untuk orang-orang yang menunaikan zakat karena telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah ditetapkan dan telah membantu saudaranya yang membutuhkan.

Kedua, aspek ekonomis. Pemberian zakat kepada mustahik meningkatkan daya beli mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dampaknya tidak hanya dirasakan mustahik, tetapi juga muzakki dan pelaku ekonomi lain melalui terciptanya ekuilibrium baru antara produsen dan konsumen. Namun, daya beli ini hanya bersifat sementara jika sebatas konsumtif. Karena itu, zakat perlu diarahkan pada sektor-sektor produktif agar manfaatnya berkelanjutan.

Keberadaan zakat produktif khususnya di Indonesia dan negara berkembang lainnya sangat diperlukan, meskipun dengan pola pendayagunaan secara produktif demi untuk menghindari mustahik miskin dari jeratan riba dan untuk memberdayakan ekonomi mereka. Dalam tataran ideal, seharusnya zakat produktif diberikan secara tamlik, namun realitas hari ini di Indonesia, hal itu belum bisa

dilakukan seluruhnya mengingat jumlah mustahik masih jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah muzakki. Apalagi jika dibandingkan dengan kemampuan lembaga zakat dalam melakukan pemungutan terhadap potensipotensi zakat yang ada. Di sisi lain, terdapat sebagian besar mustahik yang termasuk dalam katagori usia produktif yang harus dibantu dengan menggunakan program pengentasan kemiskinan.⁴¹

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwasanya zakat produktif pada dasarnya merupakan bentuk pendayagunaan zakat yang diarahkan untuk memberikan manfaat berkelanjutan bagi mustahik melalui usaha-usaha produktif, seperti perdagangan, pertanian, atau peternakan. Meskipun masih ada perbedaan pandangan dan penerapannya belum maksimal, secara syar'i zakat produktif dibolehkan berdasarkan al-Qur'an, Hadits, dan pendapat ulama. Konsep ini memiliki dua dimensi manfaat, yaitu spiritual berupa pahala bagi muzakki, serta ekonomis berupa peningkatan daya beli dan keseimbangan antara produsen dan konsumen.

2. Konsep Distribusi

Masalah distribusi erat kaitannya dengan hakhak individu dalam masyarakat. Distribusi merupakan bagian penting

⁴¹ Dr . A rmiadi Musa , MA. *Pendayagunaan zakat produktif*. M. Ag Dr. Nurdin. (Banda Aceh: PT. Naskah Aceh Nusantara, 2020). 93-94

dalam membentuk kesejahteraan suatu komunitas. Kesenjangan atau kesalahan dalam distribusi berdampak pada aspek ekonomi dan sosiopolitik, karena itu tema distribusi menjadi kajian sentral dalam filosofis ekonomi Islam.

Dalam bahasa Arab, istilah distribusi sama dengan lafaz sorofa yang berarti membelanjakan atau membagi. Distribusi juga disebut dengan perkataan auza'a yang juga mempunyai makna yang sama, kadang-kadang memberi makna membelanjakan atau mengembalikan. Pengertian khusus tersebut menunjukkan suatu tindakan yang harus dilakukan untuk dikembalikan kepada pemiliknya. Dalam al-Qur'an perkataan sorofa digunakan sebanyak 26 kali. Perkataan tersebut antaranya membawa maksud menyebar, mengirim, mengedar, menerang, dan mengalihkan. Perkataan menyebar, mengirim, dan mengedar lebih dekat kepada pengertian distribusi.

Berdasarkan pengertian tersebut serta penggunaannya di kalangan masyarakat Arab, distribusi berarti pengedaran atau pembagian yang dilakukan golongan tertentu yang dilaksanakan secara umum yakni tidak ditentukan sama rata atau sebaliknya. Menurut teori ekonomi modern, distribusi pendapatan merujuk pada keperluan atau hajat seseorang. Artinya distribusi dilakukan berdasarkan

keperluan seseorang. Justeru itu porsinya tidak akan pernah sama karena kebutuhan setiap orang berbeda.

Dalam sistem ekonomi Islam, distribusi dilihat dari dua sudut. Pertama, distribusi yang mereka peroleh akibat terlibat secara langsung dalam kegiatan produksi, seperti upah, sewa dan untung. Kedua, distribusi yang mereka peroleh yang tidak terlibat langsung dalam kegiatan produksi seperti zakat, sedekah, derma dan sebagainya. Dengan kata lain, distribusi dilakukan oleh kalangan tertentu yang telah diterapkan.

Pandangan yang sama dikemukakan oleh Baqir al-Sadar, yang berpendapat bahwa distribusi dalam Islam bukan berdasar kepada usaha semata-mata, tetapi untuk memenuhi kebutuhan. Karena itu, distribusi merupakan salah satu cara untuk mengatasi masalah yang dihadapi dalam memenuhi keperluan seseorang.

Menurut M.A. Mannan, teori distribusi hendaklah dapat mengatasi masalah dalam negara, yaitu orang miskin merupakan mayoritas penduduk. Ini artinya, distribusi lebih bertumpu kepada golongan fakir miskin karena mereka dianggap golongan yang bermasalah dan dalam jumlah yang besar.⁴²

Berdasarkan pengertian di atas, distribusi zakat dapat diartikan pembagian harta kutipan zakat kepada mereka

⁴² Ibid. 95-97

yang berhak menerimanya. Dengan kata lain, harta zakat hendaklah dibelanjakan menurut syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Mengingat tugas distribusi zakat suatu tanggung jawab yang penting, Allah Swt telah menjelaskan golongan yang berhak menerima zakat secara terperinci dalam ayat 60 surat at-Taubah. Dari sini bisa dipahami bahwa zakat perlu dibagikan kepada semua delapan golongan yang disebutkan dan tidak boleh kepada beberapa golongan saja, jika semua mereka ada. Pandangan ini berdasarkan kepada bahwa delapan golongan tersebut milik dan tuan punya zakat tersebut. Dengan kata lain, zakat tidak wajar disalurkan kepada kurang dari delapan golongan jika semua pihak ada pada saat ini.

3. Perspektif Ulama tentang Zakat Produktif

Imam Nawawi (ulama bermazhab syafi'i) menjelaskan bahwa zakat yang disalurkan kepada para mustahiq bisa saja dalam bentuk modal, yaitu berupa harta perniagaan dan alat-alat lain kepada fakir-miskin yang memiliki skill, yakni bisa seharga alat-alat yang dibutuhkan dan bisa pula lebih. Besar zakat yang diberikan disesuaikan dengan keperluan, agar usahanya memperoleh keuntungan (laba). Bentuk bantuan yang diberikan bisa berbeda-beda sesuai dengan tempat, masa, jenis usaha dan sifat-sifat individu. Misalnya pedagang barang

kelontong diberi zakat seratus sehingga dua ratus dirham. Penjual batu permata diberi lima ribu dirham. Untuk pedagang minyak wangi, tukang roti diberi sesuai keperluan. Untuk tukang jahit, tukang kayu, tukang cukur dan lain-lain diberi modal untuk membeli alat-alat, perkakas usaha yang diperlukan. Demikian juga bagi petani diberi tanah yang cukup agar dapat memberi penghasilan.

Menurut mazhab Hanafi, zakat harta seperti hewan ternak dan hasil pertanian, yang diambil dari muzakki dapat berupa nilai/harga dari benda yang dizakatkan itu, jika perkara itu lebih memudahkan. Kebolehan mengambil nilai/harga zakat dari muzakki secara logis membenarkan juga menyalurkan zakat kepada mustahiq zakat dalam bentuk modal maupun barang-barang, peralatan dan lain-lain, di luar barang yang diambil zakatnya. Di sini terlihat bahwa alasan mazhab ini yang paling kuat adalah berdasarkan hadits Nabi, yaitu ketika Nabi SAW mengutus Mu'az Bin Jabal ke Yaman untuk memungut zakat dari penduduk Yaman.

Menurut Imam Syafi'i dan beberapa ulama lainnya, zakat wajib disalurkan secara merata kepada delapan kelompok asnaf sebagaimana tersebut dalam ayat di atas. Sebagian besar ulama menyatakan, bahwa ayat tersebut tidak berarti mewajibkan zakat disalurkan secara merata

kepada delapan kelompok mustahiq zakat. Ulama tersebut adalah Malik dan beberapa ulama salaf dan khalaf seperti 'Umar Huzair, Ibnu 'Abbas, Abu al-'Aliyah Sa'id ibn Zubair dan Maimun ibn Mahran. Menurut Ibn Jarir, pendapat tersebut adalah pendapat mayoritas ulama. Menurutnya, ayat ini hanya menjelaskan tentang kelompok-kelompok penerima zakat, bukan perintah untuk menyalurkan zakat secara merata kepada delapan kelompok tersebut.

Sedangkan menurut Ibn Qayyim al-Jauziyah, delapan kelompok penerima zakat yang tersebut dalam surat al-Taubah ayat 60 dapat dibagi kepada dua kelompok yaitu sebagai berikut:

Pertama, kelompok penerima zakat yang mengambil zakat kerana keperluan yang mendesak. Yang tergolong kelompok ini adalah orang-orang fakir, miskin, hamba dan ibn alsabil.

Kedua, kelompok yang mengambil bagian zakat berdasarkan kemanfaatan. Yang tergolong ke dalam kelompok kedua ini adalah para petugas zakat (amil), mu'allaf, gharim dan fisabillah. Lebih lanjut ia mengatakan, jika orang yang mengambil zakat itu bukan orang yang memerlukan dan tidak memberikan manfaat

kepada kaum muslimin, maka ia tidak mendapat hak dari zakat.⁴³

Berdasarkan penjelasan para ulama di atas, dapat dipahami bahwa zakat tidak hanya dipandang sebatas pemberian bantuan konsumtif, melainkan juga dapat diberikan dalam bentuk produktif seperti modal usaha atau peralatan yang sesuai dengan kebutuhan mustahiq. Perbedaan pandangan mazhab memperlihatkan adanya fleksibilitas dalam menyalurkan zakat, baik berupa barang, nilai, maupun modal, selama tujuan utamanya tercapai yaitu meningkatkan kesejahteraan penerima. Hal ini sejalan dengan pemahaman bahwa zakat harus tepat sasaran, disesuaikan dengan kondisi individu, situasi, dan manfaat yang dihasilkan. Dengan demikian, pembaca dapat menyimpulkan bahwa esensi zakat adalah sebagai instrumen pemberdayaan dan kemaslahatan umat, yang penyalurannya tidak harus seragam kepada semua asnaf, tetapi dapat dioptimalkan sesuai kebutuhan dan manfaat terbesar bagi masyarakat.

⁴³ Ibid. 98-105